

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Korupsi merupakan masalah serius bagi organisasi bisnis diseluruh dunia, selain itu korupsi juga dapat menghambat aktivitas bisnis dan perusahaan untuk bersaing, organisasi didorong untuk menerapkan strategi memerangi kegiatan korupsi (Hills et al., 2009; Joseph et al., 2015). Oleh karena itu, dibuatlah strategi pencegahan korupsi dalam praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan interna dan eksternal. Hal ini sejalan dengan *Transparency International* (2010) yang menyarankan untuk mengurangi resiko suap dan korupsi perusahaan dengan cara diungkapkan ke dalam laporan perusahaan sebagai bentuk pertanggung jawaban terhadap pemangku kepentingan interna maupun eksternal.

Dalam fenomena yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri (BSM) terkait dugaan korupsi kredit fiktif sebesar Rp. 27 miliar yang diajukan oleh Koperasi Pertamina UPMS medan tahun 2011. Disebutkan dari total kredit yang disetujui sebesar Rp. 27 miliar, berdasarkan perhitungan akuntan publik ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 24 miliar. Dalam kasus ini terdapat tiga tersangka utama yang salah satunya yaitu mantan kepala cabang BSM. Pada tahun 2022 ia telah tertangkap oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan dikenakan pasal 2, pasal 3, dan pasal 18 UU No.13 tahun 1999. Ia juga didakwa telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya atas tindakan yang telah dilakukan (kompas, 2022). Kasus pelanggaran yang diakukan oleh pihak internal membuktikan bahwa penting bagi organisasi untuk mengkomunikasikan *Anti Corruption Practices* (ACP) kepada semua anggota organisasi (Joseph et al.,

2015). Dalam organisasi nirlaba, Bierstaker (2009) merekomendasikan agar direksi menyetujui kebijakan anti korupsi dengan pedoman kegiatan CSR, seperti pemberian amal, yang selanjutnya disebarluaskan di situs web perusahaan. Oleh karena itu, juga direkomendasikan bahwa harus ada beberapa mekanisme untuk mencegah perilaku tidak etis seperti korupsi, dalam pelaksanaan praktik CSR di organisasi nirlaba. Tidak hanya pada organisasi nirlaba saja, namun perusahaan - perusahaan dibidang lain seperti perbankan, manufaktur, dan lain nya pun penting untuk menyetujui kebijakan pengungkapan anti korupsi dengan pedoman CSR.

Menurut lembaga *Transparency International (TI) corruption perceptions index (CPI)* setiap tahun mengeluarkan laporan korupsi global. Skor CPI yaitu 0 – 100, nol (0) berarti terkorup dan 100 berarti paling bersih dari korupsi. Berikut laporan korupsi global pada Negara ASEAN,

**Tabel 1.1** Laporan Korupsi Global Negara ASEAN

Negara	CPI 2020	CPI 2021
Singapore	85	85
Brunei Darusalam	60	-
Malaysia	51	48
Timor Leste	40	41
Vietnam	37	39
Indonesia	36	38
Thailand	36	35
Philippines	34	33
Laos	29	30
Myanmar	28	28
Cambodia	21	23

Sumber : *Transparency International (TI)* tahun 2020 & 2021

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa Indonesia masih banyak terjadi tindak pidana korupsi dibandingkan dengan negara Malaysia. Meskipun

demikian, Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara besar di Asia Tenggara yang memiliki undang - undang dan aturan serupa yang dibentuk oleh pemerintah untuk memberantas kegiatan korupsi.

**Tabel 1.2** Populasi Muslim di Negara ASEAN

<b>Negara</b>	<b>Total Populasi</b>	<b>Persentase</b>
Singapore	5.607.300	14,00%
Brunei Darusalam	429.297	66,00%
Malaysia	31.731.000	61,30%
Timor Leste	1.269.000	0,30%
Vietnam	100.515.000	0,50%
Indonesia	275.361.267	87,18%
Thailand	68.863.514	4,90%
Philippines	104.966.660	5,57%
Laos	6.896.200	0%
Myanmar	53.550.023	4,30%
Kamboja	16.014.688	2,00%

Sumber : *Religius Facts* Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas penelitian ini memilih Indonesia dan Malaysia. Alasan mengapa memilih Indonesia dan Malaysia karena dua negara ini memiliki populasi muslim yang paling banyak di antara negara - negara ASEAN. Faktor-faktor tersebut dapat menarik investor asing ke Indonesia sebagai peluang bisnis yang besar. Namun, sebuah studi yang dilakukan oleh *Political & Economic Risk Consultancy* (2011) melaporkan bahwa baik Indonesia maupun Malaysia menghadapi masalah korupsi yang dapat mengurangi kepercayaan investor untuk melakukan bisnis di kedua negara ini.

Organisasi bisnis Islam seperti bank syariah harus beroperasi sesuai dengan ketentuan, aturan atau prinsip syariah Islam. Larangan riba adalah salah satu prinsip utama yang dipegang oleh bank syariah. Berdasarkan peran sosial, bank syariah memberikan informasi CSR untuk menunjukkan tanggung jawab dan

akuntabilitas, tidak hanya kepada masyarakat tetapi juga kepada Allah SWT (Rahman & Bukair, 2013). Bank syariah mengklaim setiap kegiatannya beroperasi sesuai dengan hukum dan prinsip - prinsip Islam (Rahman & Bukair, 2013). Karena hal tersebut, masyarakat akan berharap bahwa praktik pengungkapan yang di lakukan oleh bank syariah akan lebih transparan sehingga memberikan pengungkapan yang lebih besar, terutama dalam kegiatan sosial dan lingkungan. Disamping itu, perusahaan besar dan sudah lama berdiri merupakan emiten yang banyak disoroti, penungkapan yang lebih besar merupakan wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk itu ukuran perusahaan dan umur bank dalam penelitian ini dijadikan variabel kontrol untuk mengetahui apakah variabel ukuran perusahaan dan umur bank ini berpengaruh terhadap pengungkapan anti korupsi.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh dua pertimbangan utama, pertama penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rahman & Bukair (2013) telah mengadopsi karakteristik dewan pengawas syariah (DPS) sebagai alat ukur atribut internal perusahaan pada praktik pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Kedua, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Joseph et al (2015) yang mengadopsi pengungkapan anti korupsi pada negara Indonesia dan Malaysia menggunakan CPI sebagai alat ukur pengungkapan anti korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) sejauh mana pengungkapan anti korupsi dalam laporan keberlanjutan perusahaan bank syariah di Indonesia dan Malaysia. (2) apakah keberadaan DPS dan atributnya (jumlah anggota DPS, keanggotaan silang DPS, keahlian DPS, pendidikan DPS, reputasi DPS, rotasi keanggotaan DPS) berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan ACP oleh bank

syariah. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengisi GAP tentang pengaruh dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan anti korupsi pada bank syariah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh jumlah anggota DPS terhadap pengungkapan anti korupsi pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia ?
2. Apakah ada pengaruh keanggotaan silang DPS terhadap pengungkapan anti korupsi pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia ?
3. Apakah ada pengaruh keahlian DPS terhadap pengungkapan anti korupsi pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia ?
4. Apakah ada pengaruh pendidikan DPS terhadap pengungkapan anti korupsi pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia ?
5. Apakah ada pengaruh reputasi DPS terhadap pengungkapan anti korupsi pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia ?
6. Apakah ada pengaruh rotasi keanggotaan DPS terhadap pengungkapan anti korupsi pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh jumlah anggota DPS terhadap pengungkapan anti korupsi pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia

2. Untuk menganalisis pengaruh keanggotaan silang DPS terhadap pengungkapan anti korupsi pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia
3. Untuk menganalisis pengaruh keahlian DPS terhadap pengungkapan anti korupsi pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia
4. Untuk menganalisis pengaruh pendidikan DPS terhadap pengungkapan anti korupsi pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia
5. Untuk menganalisis pengaruh reputasi DPS terhadap pengungkapan anti korupsi pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia
6. Untuk menganalisis pengaruh rotasi keanggotaan DPS terhadap pengungkapan anti korupsi pada bank syariah di Indonesia dan Malaysia

#### **1.4 Manfaat penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan penulis sebagai berikut:

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Di harapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk bahan referensi yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan.
2. Penelitian ini merupakan latihan serta pembelajaran dalam menerapkan teori serta menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman.

3. Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan acuan dan bahan dalam membandingkan bank syariah yang akan menjadi sasaran investasi.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini merupakan praktik langsung untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dalam bidang akuntansi.
2. Hasil dari penelitian ini mungkin dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

#### **1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Ruang lingkup dan batasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kriteria dewan pengawas syariah yang terdiri dari jumlah anggota DPS, keanggotaan silang DPS, Keahlian DPS, pendidikan DPS, reputasi DPS, dan rotasi keanggotaan DPS per tahun serta pengaruhnya terhadap pengungkapan anti korupsi.
2. Objek penelitian ini adalah bank syariah yang terdaftar di Indonesia dan Malaysia tahun 2020 - 2021.

#### **1.6 Sistematis Penulisan**

Penulisan dalam skripsi ini dilakukan secara teratur dari bab per bab yang masing-masing bab dibagi kedalam sub bab. Isi dan bahasan ini disajikan dalam bentuk sistematika.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang yang terdiri dari masalah-masalah yang melandasi penelitian. Selanjutnya akan dibahas tentang rumusan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian dan tujuan penelitian.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini berisi tentang uraian teori - teori yang mendasari pembahasan secara detail, tidak hanya teori pada bab ini juga di dijelaskan tentang kerangka konseptual dan hipotesis.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Penelitian Bab ini berisi tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, pengukuran variabel penelitian dan metode analisis data yang terdiri dari uji kualitas data dan analisis data.

## **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum hasil penelitian, analisa data dan pembahasan hasil pengujian hipotesis.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi tentang simpulan dan hasil penelitian yang dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.